

## Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Dan Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi Deskriptif di Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang)

Salma Nurul Izzah<sup>1</sup> Dinar Sugiana Fitrayadi<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [salmanurulizzah@gmail.com](mailto:salmanurulizzah@gmail.com)<sup>1</sup> [dinar.sugiana@untirta.ac.id](mailto:dinar.sugiana@untirta.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan strategi program BUMDes dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal di Desa Labuan tanpa adanya bantuan dana desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a). Pengelolaan dan pelaksanaan program BUMDes belum optimal akibat berbagai hambatan internal dan eksternal. (b) Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pendanaan, (c) komunikasi yang kurang efektif, (d) fasilitas yang tidak memadai, (e) rendahnya daya saing pasar, dan (f) waktu diskusi yang tidak ideal. Meskipun demikian, terdapat perencanaan program lanjutan berupa pengembangan UMKM yang berpotensi meningkatkan perekonomian desa. Strategi untuk mengatasi hambatan pendanaan dilakukan melalui pelibatan stakeholder dan promosi melalui media sosial. Selain itu, pendekatan berbasis manajemen kekeluargaan juga diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Namun, dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal.

**Kata Kunci:** Program, BUMDes, Inklusi Keuangan, Pembangunan Ekonomi Lokal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Articles Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan berbagai perkembangan positif, namun masih diwarnai tantangan, seperti kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan seringkali menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman tentang pembangunan nasional dan optimalisasi potensi lokal (Sarinah et al., 2019). Salah satu isu utama adalah tingkat kemiskinan, meskipun data terbaru menunjukkan adanya penurunan. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi 7,09% dari 7,29% pada Maret 2023, sementara di pedesaan turun menjadi 11,79% dari 12,22% (Kementerian Keuangan, 2024). Penurunan ini menjadi indikator positif, namun perlu langkah strategis untuk memperkuat pembangunan nasional, terutama di desa-desa. Inklusi keuangan menjadi salah satu solusi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%, yang mengalami penurunan dari 88,7% pada 2023 (OJK, 2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam perluasan akses ke layanan keuangan, seperti keterbatasan pendapatan masyarakat, minimnya fasilitas perbankan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan. Padahal, inklusi keuangan memiliki peran vital dalam meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan (Muljadi, 2017).

Salah satu strategi untuk mendukung pembangunan ekonomi desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bertujuan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, BUMDes memiliki peran sebagai pengelola usaha ekonomi desa, penyedia layanan publik, dan pengembang potensi desa (Sukardi, 2023). Namun, implementasi BUMDes di beberapa desa masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan modal, partisipasi masyarakat yang rendah, dan kendala promosi usaha. Sehingga tidak sedikit BUMDes yang ada di provinsi Banten atau sekitarnya masih belum memenuhi taraf keberhasilan pencapaian program. Penelitian ini berfokus pada BUMDes Daya Mandiri di Desa Labuan yang merupakan salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Pandeglang. BUMDes Daya Mandiri Memiliki berbagai program usaha, termasuk produksi paving block dan layanan jasa keuangan melalui Brilink. Meskipun telah menunjukkan antusiasme dalam pengembangan program, BUMDes ini masih menghadapi kendala dalam hal modal, komunikasi, dan promosi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan strategi program BUMDes dan Hambatan pelaksanaan program, sekaligus dampak program BUMDes dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara naratif dan mendalam berdasarkan fakta lapangan. Sehingga dapat menggambarkan kondisional implementasi kebijakan BUMDes dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan fokus pada implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pihak terkait pelaksana program, seperti pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain itu, bersumber dari data sekunder berupa jurnal, buku, dan website internet, serta dokumen kegiatan dan laporan keuangan BUMDes turut mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah berdasarkan wawancara, observasi dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan peraturan pemerintah. Teori yang digunakan sebagai teori acuan keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan teori menurut Van meter Van Horn (Megawati, 2018) yang terdiri dari Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap agen pelaksana. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan, dan lingkungan eksternal. Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (Sutriani & Octaviani, 2019) yang terdiri dari data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Labuan merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, provinsi Banten. Desa Labuan merupakan salah satu desa yang mendirikan BUMDes sebagai inisiasi pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal ini, untuk mengetahui lebih lanjut terkait keberhasilan implementasi kebijakan BUMDes, peneliti merujuk pada teori menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dalam 6 aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan pada BUMDes Daya Mandiri Labuan dalam mendorong Inklusi Keuangan dan pembangunan ekonomi desa. Keenam indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Daya Mandiri Desa Labuan, yang resmi berbadan hukum sejak 2023, dibentuk untuk memperkuat

perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan usaha lokal lainnya. Kebijakan pendiriannya sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3, yang menekankan pengelolaan usaha desa demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pendekatan ini juga sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menyoroti pentingnya kesesuaian tujuan dan implementasi kebijakan. Namun, program BUMDes saat ini, seperti pembuatan paving blok/batako dan layanan keuangan BRILink, belum optimal akibat keterbatasan modal dan kurangnya kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas pelaku UMKM. Hal ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat terhadap usaha paving blok, yang kurang relevan dengan potensi ekonomi lokal Desa Labuan di sektor perdagangan dan UMKM. Akan tetapi, Program BRILink memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan dan memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM, meskipun pelaksanaannya terkendala modal yang didanai secara pribadi tanpa dukungan anggaran desa. Sebaliknya, pengembangan UMKM melalui produk lokal seperti otak-otak dan dendeng menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memanfaatkan potensi pasar tradisional desa. Adapun perencanaan keberlanjutan BUMDes meliputi diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, yang berkolaborasi dengan pelaku UMKM yakni masyarakat dan mengoptimalkan promosi produk. Strategi ini didukung teori Hasan & Azis (2019) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengembangan institusi lokal, serta teori Faizah (2022) yang mendorong perluasan akses keuangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber Daya. BUMDes Daya Mandiri menghadapi tantangan utama berupa minimnya pendanaan, karena modal yang digunakan berasal dari sumber pribadi, bukan dana desa. Hal ini bertentangan dengan PPRI Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa modal BUMDes sebagian besar harus dimiliki desa. Namun, BUMDes tetap berusaha transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga mampu mendapatkan apresiasi dari DPMPD, dan mampu mengatasi kendala masalah permodalan dengan menjalin kemitraan strategis, seperti dengan BRI dan CSR PLN. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala, utama dalam mendukung mobilisasi program. Akan tetapi, adanya dukungan masyarakat melalui pemberian kantor baru telah membantu operasionalisasi BUMDes walaupun kantor tersebut masih tahap renovasi. Di sisi lain, SDM Desa Labuan memiliki potensi besar dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, meskipun keberhasilan dari aspek SDM sudah bagus, keberhasilan program akan sulit dicapai tanpa adanya loyalitas dan tanggung jawab pelaksana. Untuk itu, BUMDes telah melaksanakan pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan kompetensi masyarakat, Hal tersebut sejalan dengan PPRI Pasal 36. Berdasarkan hasil temuan di atas yang merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan sangat bergantung pada efisiensi penggunaan sumber daya. Hal tersebut dipertegas kembali oleh teori George Edwards III (Fajriati, 2022) yang juga menekankan pentingnya SDM kompeten dan sumber daya finansial yang memadai. Oleh karena itu, keberlanjutan program BUMDes memerlukan sinergi konkret antara pemerintah desa, masyarakat, dan mitra eksternal untuk mendukung pendanaan, fasilitas, dan pengembangan SDM, demi mencapai tujuan meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana. Berdasarkan hasil temuan peneliti, BUMDes Daya Mandiri Desa Labuan menekankan pentingnya kompetensi manajerial dan teknis dalam memilih anggota pelaksana. Anggota dipilih berdasarkan kemampuan, dedikasi, serta visi misi yang selaras dengan tujuan BUMDes. Selain profesionalitas, pelaksana juga dituntut memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen. Hal ini sesuai dengan PPRI Pasal 24 ayat (4)

yang mengatur syarat keahlian, kepemimpinan, dan integritas bagi pelaksana BUMDes, serta teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya karakteristik pelaksana dalam keberhasilan program. Dalam menjalankan kebijakan program, koordinasi intensif antara Kepala Desa dan Direktur BUMDes menjadi kunci untuk mengatasi berbagai kendala operasional. Meskipun tidak semua perangkat desa terlibat langsung, komunikasi antara pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa langsung dan Badan Pengawas Desa (BPD) serta pihak-pihak yang berkaitan dengan program, tetap berjalan efektif dan efisien, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dan transparan. Pendekatan ini sesuai dengan PPRI Pasal 72 ayat (2) tentang pentingnya sinergi dalam pembinaan BUMDes, serta teori P.K.D.S yang menekankan pengelolaan ekonomi desa secara partisipatif dan akuntabel. Manajemen BUMDes juga mengedepankan fleksibilitas dengan semangat kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam PPRI Pasal 4. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan terbuka, melibatkan seluruh anggota untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti CSR PLN dan BRI, telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan program, sesuai PPRI Pasal 54 ayat (1) yang mengizinkan kerja sama dengan pihak lain. Sehingga berdasarkan teori rujukan yakni menurut Van Meter dan Van Horn (Meigawati, 2018), serta teori pengembangan ekonomi lokal oleh Rahma (Rozikin & Haris, 2021), keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kolaborasi dan inisiatif pelaksana dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Serta menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan mitra eksternal menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan program BUMDes Daya Mandiri, baik dari segi pendanaan maupun pengembangan usaha.

4. Sikap Agen Pelaksana. Sikap proaktif dan kolaboratif agen pelaksana BUMDes Daya Mandiri berperan penting dalam keberhasilan program, meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan modal dan ketergantungan fasilitas. Pelaksana memahami kebijakan dan tujuan BUMDes serta menunjukkan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah melalui pendekatan kekeluargaan dan kerja sama dengan masyarakat lokal. Kendati demikian, program bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat, sehingga optimalisasi potensi desa masih menjadi tantangan. Direktur BUMDes menegaskan bahwa pentingnya kesatuan visi, misi, dan kerja sama dalam mengelola program. Dukungan masyarakat dinilai positif, meskipun keberlanjutan program belum maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Fauji selalu masyarakat. Komunikasi efektif antara pengelola dan masyarakat menjadi upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi, terutama dalam pengelolaan keuangan. Motivasi utama pelaksana adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat, baik dengan maupun tanpa dukungan finansial desa. Pendekatan kultural melalui musyawarah turut memperkuat relevansi dan keberlanjutan program. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti BRI dan CSR PLN menjadi strategi penting untuk menambah sumber daya dan memperluas dampak program. Berdasarkan temuan di atas terkait sikap pelaksana BUMDes Daya Mandiri yang mencerminkan dedikasi, fleksibilitas, dan responsivitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan PPRI Pasal 24 ayat (4), yang menekankan pentingnya keahlian, integritas, dan dedikasi dalam pengelolaan BUMDes. Teori Van Meter dan Van Horn, serta George Edwards III, juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sikap dan komitmen pelaksana. Dengan demikian, pelaksana BUMDes Daya Mandiri menunjukkan kapasitas untuk menghadapi tantangan, menjaga keberlanjutan program, dan mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

5. Komunikasi Antara Organisasi dan Pelaksana Kegiatan. Komunikasi antara BUMDes Daya Mandiri dengan kepala desa, aparat desa, BPD, dan masyarakat telah berjalan rutin dan efektif. Namun, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program masih terbatas pada kelompok tertentu, seperti pelaku UMKM di bidang perikanan, pertanian, peternakan, dan pekerja teknis. Meskipun komunikasi dengan kelompok ini intensif, komunikasi dan dukungan pendanaan dari pemerintah desa masih belum optimal, sehingga menghambat keberlanjutan program. BUMDes telah menerima pelatihan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten sesuai PPRI Pasal 72, tetapi pengawasan dari pemerintah desa masih kurang. Tantangan utama meliputi minimnya modal dan dukungan pendanaan, sehingga kontrol dan pengawasan yang diterima oleh BUMDes lebih banyak dilakukan oleh mitra eksternal seperti PLTU yang telah mendanai BUMDes dalam bentuk mesin paving blok. Dalam pelaksanaan program, BUMDes menggunakan strategi komunikasi selektif dengan melibatkan kelompok tertentu dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, serta insentif kepada mereka. Strategi ini efektif dalam mendukung operasional program meskipun keterlibatan masyarakat belum merata. Selain itu, BUMDes merencanakan untuk memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan unit usaha yang sedang dijalani sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi hambatan promosi produk, memperkuat silaturahmi dengan masyarakat maupun pemerintah desa, dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat program. Upaya ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan demikian, komunikasi yang baik antara BUMDes dan pihak terkait menjadi faktor penting dalam keberhasilan program, hal tersebut sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn (Meigawati 2018) yang menekankan pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan. Namun, pengawasan dan dukungan pemerintah desa perlu ditingkatkan untuk memastikan kelangsungan program. Sosialisasi yang efektif, pengembangan konsep usaha inovatif, dan peningkatan dukungan masyarakat menjadi kunci untuk mendorong keberlanjutan dan kesuksesan BUMDes.
6. Lingkungan Eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi keberhasilan program BUMDes Daya Mandiri. Potensi pemberdayaan UMKM di Desa Labuan sangat besar, karena mayoritas penduduknya adalah pelaku usaha di pasar tradisional. Direktur BUMDes menegaskan pentingnya program pengembangan UMKM yang bermitra dengan masyarakat. Namun, kendala seperti permodalan, infrastruktur, dan komunikasi menghambat pencapaian tujuan. Program seperti BRILink dan produksi batako belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, meskipun memiliki potensi untuk mendukung ekonomi lokal. Hambatan utama meliputi keterbatasan modal yang mayoritas berasal dari sumber mandiri, minimnya dukungan pemerintah desa, dan kurangnya fasilitas produksi. Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat tercapainya keberhasilan program. Selain itu, produk BUMDes belum diminati masyarakat meskipun harganya kompetitif, karena rendahnya promosi dan sosialisasi. Sehingga untuk mengatasinya, diperlukan komunikasi intensif, inovasi produk, dan strategi pemasaran melalui kemitraan dengan BUMN, UMKM, CSR, serta sosial media. Selanjutnya strategi BUMDes mencerminkan kolaborasi yang inklusif dengan berbagai pihak. Seperti halnya program BRILink yang memberikan dampak positif dengan memudahkan transaksi keuangan masyarakat, Dam produksi batako yang menciptakan lapangan kerja meskipun masih musiman. Dengan demikian, upaya ini menunjukkan peran ganda BUMDes sebagai lembaga sosial dan komersial, yang sesuai dengan teori Andreas (2019) dan Prasetyo (2016). Sehingga dapat disimpulkan, keberhasilan BUMDes Daya Mandiri bergantung pada kolaborasi dengan masyarakat dan peningkatan infrastruktur,

modal, serta kesadaran masyarakat. Dengan langkah strategis ini, BUMDes dapat lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan berkelanjutan di Desa Labuan.

## **KESIMPULAN**

Implementasi program BUMDes Daya Mandiri di Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang, bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi lokal. Perencanaan program ini difokuskan pada pemberdayaan potensi lokal seperti program BRILink dan produksi paving blok. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan modal dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal menjadi kunci untuk mengatasi kendala tersebut, disertai evaluasi berkelanjutan serta penguatan sektor UMKM, perdagangan, dan kuliner lokal. Strategi pelaksanaan BUMDes menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan efisiensi pengelolaan. Kemitraan dengan CSR PLN dan BRI menjadi solusi untuk persoalan permodalan, sementara pelatihan SDM lokal menunjukkan potensi besar untuk mendukung keberhasilan program. Pendekatan berbasis gotong royong, musyawarah, transparansi, serta komunikasi efektif antar organisasi terbukti penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Namun, keberlanjutan program memerlukan penguatan pendanaan, peningkatan fasilitas, dan optimalisasi kompetensi SDM. Hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya modal, infrastruktur yang belum memadai, dan komunikasi yang belum maksimal. Ketergantungan pada sumber dana mandiri serta minimnya dukungan dari pemerintah desa menjadi tantangan utama, ditambah daya saing produk seperti batako dan layanan BRILink yang masih rendah. Hambatan ini mencerminkan kurangnya dukungan lingkungan eksternal terhadap pengelolaan BUMDes. Meskipun demikian, program BUMDes telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Program BRILink mempermudah akses layanan keuangan, sementara produksi batako dan pengelolaan perahu menciptakan lapangan kerja, meski bersifat musiman. Dampak ini turut memperkuat solidaritas sosial antara BUMDes dan masyarakat. Keberlanjutan program memerlukan perbaikan infrastruktur, penambahan modal, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan BUMDes secara optimal, demi mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan.

## **Saran**

Implementasi program BUMDes Daya Mandiri di Desa Labuan belum optimal akibat berbagai hambatan, sehingga diperlukan perbaikan dari berbagai pihak. (1) Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan, serta memastikan kebijakan selaras dengan kearifan lokal. (2) BUMDes disarankan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran, melibatkan generasi muda, menciptakan produk relevan, meningkatkan kapasitas tim, dan memanfaatkan gedung evakuasi tsunami sebagai pusat UMKM kreatif. (3) Masyarakat diharapkan lebih memahami manfaat program, aktif berpartisipasi sebagai mitra UMKM, mendukung inovasi, dan memberikan masukan membangun untuk meningkatkan efektivitas program.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andreas, R. (2019). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam). *Jurnal Hukum Legalita*, 1(1), 1-21.
- Faizah, N. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Muslim Papua Melalui Inklusi Keuangan (Studi Pada BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 152-166.

- Fajriati, A. (2022). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati) 2022 (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat. Makassar: Pustaka Taman Ilmu
- Meigawati, D. (2018). Implementasi Program Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan).
- Menpan.go.id. (2024) Angka kemiskinan dan ketimpangan Indonesia menurun. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/angka-kemiskinandan-ketimpangan-indonesia-menurun>
- Muljadi, M. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT dalam Meningkatkan BUMDES dan Akses Keuangan di Banten. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 191-201.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data
- Ojk.go.id (2024). OJK dan BPS umumkan hasil survei nasional literasi dan inklusi Keuangan tahun 2024. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJKdan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-KuanganTahun-2024>.
- Pembangunan, P. K. D. S. (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11, Tahun 2021, Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86-100
- Rozikin, M., & Haris, R. (2021). Pengembangan sumber daya ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep: pendorong dan penghambat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 121-133.
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan
- Sukardi, S. (2023). Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 6(2), 120-128